

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai dampak dari implementasi kebijakan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah dampak dari pengimplementasian kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 39 Tahun 2013 terhadap perempuan. Dampak dari pengimplementasian kebijakan tersebut dianalisis dengan berdasarkan pada jawaban yang disampaikan oleh narasumber yang didapat dengan metode wawancara. Penelitian ini menjelaskan lebih dalam mengenai bagaimanakah dampak dari pengimplementasian Peraturan Walikota Yogyakarta No. 39 Tahun 2013 dilihat dengan teori implementasi kebijakan oleh George Edwards III, yakni dianalisis berdasarkan pola komunikasi (transmisi, kejelasan, konsistensi), sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasinya. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan berupa studi kasus. Pengumpulan data yang dilakukan dikategorikan menjadi 2 jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari proses wawancara dengan tiga narasumber. Adapun narasumber yang dimaksud antara lain Kepala Bidang PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Kepala UPT PPA DP3AP2KB Kota Yogyakarta, dan Kepala Sub-bagian TU sekaligus mediator lapangan penanganan kekerasan berbasis gender UPT PPA Kota Yogyakarta. Data sekunder didapat melalui temuan pendukung yang didapatkan dari media online dan laporan data kuantitatif dari SIGA Data Perlindungan DP3AP2 DIY. Ditinjau dari teori implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III, kebijakan tersebut sudah saling terkait secara harmonis satu sama lain sehingga pelaksanaan substansi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 39 Tahun 2013 dalam pengimplementasiannya kemudian memberikan pengaruh terhadap fluktuasi jumlah kasus yang dilaporkan kepada DP3AP2KB yang kemudian dapat menjadi indikator peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dalam perjalanan pengimplementasiannya, dapat diketahui apa saja yang harus diperbarui dari kebijakan tersebut secara praktis.

Kata kunci: perempuan, kekerasan, dampak implementasi, kebijakan, DP3AP2KB, UPT PPA

ABSTRACT

This thesis discusses the impacts of the implementation policies for handling victims of violence against women by the Women's Empowerment, Child Protection and Population Control, and Family Planning Service in Yogyakarta city (DP3AP2KB). This thesis aims to find out the impact of the policy implementation of Yogyakarta Mayor Regulation No. 39 of 2013 towards women. The impact of implementing the policy was analyzed based on the answers given by the informants obtained using the interview method. This research explains in more depth the impact of implementing Yogyakarta Mayor Regulation No. 39 of 2013 by using the theory of policy implementation by George C. Edwards III, which is analyzed based on communication patterns (transmission, clarity, consistency), resources, disposition, and bureaucratic structure. The research was conducted using qualitative methods and used a case study approach. The data collection carried out was categorized into 2 types, primary data and secondary data. Primary data was obtained from an interview process with three informants. The informants referred to include the Head of the Yogyakarta City DP3AP2KB PPA (Protection of Women and Children) Division, the Yogyakarta City PPA DP3AP2KB UPT (Technical Implementation Unit) Head, and the Head of the Administration Sub-Division as well as the field mediator for handling gender-based violence at the Yogyakarta City PPA UPT. Secondary data was obtained through supporting findings obtained from online media and quantitative data reports from SIGA DP3AP2 DIY Protection Data. Judging from the theory of policy implementation by George C. Edwards III, these policies are harmoniously linked to each other so that the implementation of the policy substance can run well. Yogyakarta Mayor Regulation No. 39 of 2013 in its implementation then has an influence on fluctuations in the number of cases reported to DP3AP2KB which can then be an indicator of increasing public trust in the government. In the course of its implementation, it can be seen what practically needs to be updated about the policy.

Key words: women, violence, impact of implementation, policy, DP3AP2KB, UPT PPA